

Rasakan

RS Swasta Bukan Semata Industri

PANDEMI Covid-19 belum ada tanda-tanda mereda. Dari hari ke hari jumlahnya tidak semakin menurun. Justru terus bertambah. Secara nasional kasus positif melonjak tajam di sejumlah daerah selama dua pekan terakhir, sehingga Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa hal itu sudah lampu merah.

Pun demikian DIY. Meskipun lonjakannya tidak terlalu tinggi, namun tetap harus diwaspadai. Keputusan pemerintah provinsi untuk memperpanjang status Tanggap Darurat hingga akhir bulan Juli dan tidak buru-buru menerapkan status new normal (adaptasi kebiasaan baru) adalah kebijakan yang tepat. Pasalnya masyarakat belum sepenuhnya bisa menerapkan protokol kesehatan, sehingga perlu terus diingatkan dan diberikan pemahaman yang utuh.

Dilematis memang. Di satu sisi, masyarakat yang selama tiga bulan 'terpaksa' harus berada di rumah, sudah sangat rindu untuk beraktivitas seperti sediakala. Namun di sisi yang lain, harus tetap berhati-hati melakukan kegiatan, agar tidak tertular atau menularkan virus tersebut. Dari sisi rumah sakit, hingga saat ini DIY termasuk sudah sangat siap, jika tidak ada lonjakan yang luar biasa. Baik rumah sakit (RS) pemerintah maupun swasta, tidak ada kendala dalam penanganan wabah ini.

Yang harus menjadi keprihatinan adalah bagaimana RS swasta, baik yang menjadi rujukan maupun non-rujukan bisa bertahan seiring dengan pandemi ini. Penurunan tingkat okupansi kamar dan jumlah pasien berobat jalan ke RS turun drastis.

Umumnya masyarakat ragu-ragu dan takut untuk datang ke RS. Itu wajar. Pasalnya, belum semua masyarakat tahu bahwa tidak semua RS menjadi rujukan Covid-19. Oleh karena itu harus ada edukasi yang benar agar semuanya paham terhadap kejadian yang menghebohkan dunia ini.

Imbas dari kesemuanya, pemasukan RS mengalami penurunan yang signifikan dan tidak sedikit yang mulai kesulitan likuiditas. Tidak aneh jika dikabarkan beberapa RS swasta telah melakukan pengurangan secara berkala terhadap jumlah tenaga kesehatan, dengan alasan efisiensi. Tentu itu bukan satu-satunya cara. RS swasta pasti sudah punya strategi lain yang tepat, karena pandemi ini belum pasti kapan akan berakhir.

Untuk itu perlu ada langkah strategis antara pemerintah dan RS swasta untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Sebab bagaimanapun juga RS swasta tidak semata-mata sebagai industri, tetapi juga berfungsi sebagai pelayanan medis dan pelayanan sosial. Dengan demikian keberadaannya tetap dibutuhkan, baik selama maupun pasca pandemi Covid-19. ■

'Deklamasi Ancol'

Sebait Sajak Pantai Ancol

*di pantai ini tak kutemukan lagi bayang-Mu
orang-orang kelewat mabuk mimpi dan nafsu
ombak yang setia menggelombang dan bulan
tak lagi menyentuh sanubari mereka*
Ahmadun Yosi Herfanda, Jakarta 1977

ITULAH sepenggal puisi berjudul 'Sebait Sajak Pantai Ancol' karya sastrawan Indonesia, Ahmadun Yosi Herfanda, yang diciptakan di Jakarta tahun 1977. Menurut penyair asal Kaliwungu Kendal Jawa Tengah itu, puisi tersebut ditulisnya pada masa awal kepenyairannya. Dan, itulah persepsi dan kesan tentang Ancol yang tertangkap oleh daya imajinasi dan kreasi seorang penyair, seorang sastrawan.

Tidak terasa, 'Sebait Sajak Pantai Ancol' sudah sekitar 33 tahun mengendap dalam inspirasi dan imajinasi yang kreatif, menawarkan kesan kemanfaatan Ancol saat itu. Dalam kondisi anak-anak negeri sedang tiarap karena terdampak pandemi Covid-19, mendadak wacana Reklamasi muncul lagi. Entah, apa pertimbangannya, wacana tersebut dimunculkan bersamaan masyarakat sedang terpuruk, seperti saat ini.

Pernyataan-pernyataan pro-kontra, saling klaim dan saling merasa paling benar, dalam kaitan wacana Reklamasi Ancol, mendadak menyeruak di ruang-ruang publik. Tentu saja menurut kepentingan dan keinginan masing-masing pihak. Sama abai terhadap nilai kemanfaatan Ancol bagi masyarakat selama ini. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang sedang dibingklai oleh penyebaran virus Korona saat ini.

Dalam hiruk pikuk 'pertentangan tentang reklamasi Ancol', wacana tersebut terasa seperti dendang deklamasi 'Sebait Sajak Pantai Ancol' yang terasa penuh satire: <I>ombak yang setia menggelombang dan bulan tak lagi menyentuh sanubari mereka<P>. Lantas, siapa yang dimaksud 'mereka' dalam puisi tersebut?

Entahlah. Selasa (14/7) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pekerja dan pelaku seni di Istana Negara. Mereka diminta membantu pemerintah untuk menyampaikan gagasan, pemikiran dan langkah strategis dalam dalam penanganan Covid-19.

Dalam waktu hampir bersamaan, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Ahmad Yuriyanto menyatakan bahwa selama ini masyarakat bingung dengan istilah normal baru (kenormalan baru). Banyak masyarakat menafsirkan istilah tersebut sebagai kegiatan seperti biasa tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Karena itu, diksi normal baru diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Ini juga sungguh luar biasa, diksi yang selama ini lebih akrab dengan sastrawan, kini juga menjadi dasar pemikiran pihak pemerintah. Hebat juga pernyataan Yuri, bahwa sebagai jubi pemerintah ia sadar hal itu sebagai risiko komunikasi yang dihadapi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyatakan, untuk kelancaran AKB ini diperlukan peran aktif semua pihak termasuk para pemuka agama. Juga peran seniman, budayawan, sastrawan, dan apapun sebutannya. Jangan ada lagi debat Ancol menyeruak di tengah normal baru atau adaptasi kebiasaan baru, ya? ■

Dr (HC) Drs H Abdul Halim Iskandar MPd:

Keseimbangan Alam Jangan Diganggu

TUGAS Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDPT) sangat kompleks. Tidak hanya mengurus dana desa bagi kesejahteraan warga, juga infrastruktur lain. Demikian diungkapkan Menteri DPDPT, Dr (HC) Drs H Abdul Halim Iskandar MPd. "Di Papua, ada empat ribu desa belum berlistrik. Bayangan saya, dana desa untuk daerah itu 60 persen dipakai, didukung APBN melalui PLN dan PUPR. Sehingga setahun ini selesai urusan elektrifikasi desa di Papua," paparnya.

Abdul Halim mengungkapkan hal itu saat bertemu di *Kedaulatan Rakyat*, Jumat (10/). Ia diterima Direktur Utama PT BP *Kedaulatan Rakyat* M Wirmon Samawi SE MIB, Komisaris Utama Prof Dr Inajati Adrisijanti, Direktur Keuangan Imam Satriyadi SH, Direktur Umum Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc, Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos, serta Wakil Pemimpin Redaksi *Kedaulatan Rakyat* dan *Minggu Pagi* Drs H Ahmad Luthfie MA.

Mengenai urusan transmigrasi. menteri kelahiran 14 Juli 1962 itu mengatakan saat ini ada transmigrasi lokal dan lintas provinsi. Beberapa provinsi moratorium, dan kini mulai ada permintaan. "Tapi kita betul-betul hati-hati, karena permintaan pemerintah dengan masyarakat kadang tidak



Abdul Halim Iskandar saat berkunjung di Kedaulatan Rakyat.

MP-Latief ENR

sama. Gubernur minta, pemerintahnya butuh (transmigran) karena butuh SDM supaya lahan dikelola sebagai potensi ekonomi. Tapi belum tentu warganya berkenan," ungkapnya.

Ditegaskan, transmigrasi masih berjalan. Yang dilakukan kini fokus intensifikasikan pertanian untuk ketahanan pangan. "Perambahan hutan merusak alam. Untuk membawa kayu jarahan memanfaatkan sungai. Ini berisiko. Sungai yang penuh kayu bisa menyebabkan banjir. Untuk keseimbangan, alam jangan diganggu, kalau mau hidup nyaman. Kalau tidak, ya sudah akan berhadapan dengan alam. Tunggu waktunya," tandas suami Lilik Umi Nashiah itu.

Menjadi menteri bukan target Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2014-2019 itu.

Ia pernah bermimpi menjadi guru besar. Halim merasa bangga dan senang bila melihat para profesor. Demi mewujudkan impiannya itu, usai merampungkan kuliah di Yogya, Halim mengajar di MAN Manbaul Ma'arif Denayar Jombang. Sempat pula ia menjadi kepala SMK Sultan Agung Tebuireng Jombang, serta dosen Universitas Hasyim Asy'ari. Tahun 1997, Halim diterima jadi PNS Kemenag, mengajar di Pontianak Kalimantan Barat, namun tidak diambil karena sang ibu saat itu tidak tega melepasnya ke Kalimantan.

Ketika dana desa akan digulirkan, Halim bersikeras membagi secara nontunai, demi keamanan sekaligus menaikkan inklusi keuangan negara. Namun rencana kebijakan tersebut diprotes, karena tingkat

kesulitan tinggi. Halim kemudian mengalah. "Ambil uang di bank itu risiko. Nanti kalau disimpan di balai desa, bagaimana keamanannya. Juga urusan ngitungnya. Uang baru *lunyu, isa katut*. Kalau 1.000 KK, berapa kemungkinan uang yang terselip karena salah menghitungnya" kata Sarjana S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur 2011-2022 itu.

Tentang Covid-19 yang hingga saat ini belum bisa diprediksi berakhirnya, Halim menjawab plastis. "Intinya, mau tidak mau hidup berdampingan dengan Covid. Tidak tahu sampai kapan. Pokoknya pakai masker, jaga jarak, kesehatan," tegas Halim. ■ **Lat**

DUKUNG PENGEMBANGAN POTENSI DESA

Tanah Perhutani untuk Jalan Tembus



MP-Muchtar Muhammad

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono saat meninjau proyek jalan di Dusun Wanasari Argasoka.

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara melalui Dinas PUPR saat ini sedang membangun jalan tembus di batas wilayah Kabupaten Kebumen dari arah Dusun Wanasari Kelurahan Argasoka ke Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan. Proyek yang dikerjakan ini berupa pengeprasan tebing di kawasan hutan Perhutani sepanjang 1,7 kilometer. Diharapkan jalan tembus tersebut juga mampu mendukung mengembangkan potensi ekonomi pedesaan.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono saat meninjau lokasi jalan tembus, belum lama ini, mengatakan jalur Wanasari menuju Desa Pesangkalan ke depan akan menjadi akses penghubung antara

Banjarnegara-Kebumen yang paling dekat.

"Pemkab Banjarnegara serius menghidupkan jalur selatan. Kami optimis, jalur baru ini bakal menghidupkan roda ekonomi warga di perbatasan Banjarnegara-Kebumen," tandasnya.

Kepala Bidang Bina Marga DPU PR Banjarnegara, M Arqom Al Fahmi menjelaskan, kegiatan proyek peningkatan jalan jalur Wanasari dianggarkan dari APBD tahun 2020 Rp 5,7 miliar. Direncanakan, panjang jalan sekitar 1,7

kilometer dengan lebar 6 meter, dan kini sudah mencapai 30 persen. "Setelah pengeprasan tebing, tinggal pengaspalan. Datangnya musim kemarau sangat membantu kegiatan di lapangan. Pelaksanaan pekerjaan jadi lebih cepat," kata Arqom.

Menurutnya, pengeprasan tebing dilakukan atas izin dari Perum Perhutani KPH Banyumas Timur. Selain dari arah Dusun Wanasari, pembangunan jalan ke arah batas Kebumen sebelumnya sudah dilakukan oleh Pemkab Banjarnegara di Dusun Kayubima Desa Petir Kecamatan Purwanegara dan Desa Duren Kecamatan Pagedongan.

■ **Muhtar Muhammad**

IKLAN BARANG HILANG

Hilang BPKB Nopol AB 1708 SY a/n Irene Suheriani Suparman d/a Jl.Adisucipto Km 7,5 Santan Depok Sleman	BPKB AB 6498 MQ an Westri Winarsih, Perum KCVRI No.82 Kencuran RT011/036 Sukoharjo Ngaglik Sim
Hilang BPKB Nopol AB 1889 BN a/n Fitri Asih, SE d/a Mesan No.52 RT 02/31 Sinduadi Mlati Sleman YK	BPKB AB 6498 MQ an Westri Winarsih d/a Perum KCVRI No.82 Kencuran Rt 011/036 Sukoharjo Ngaglik Sim
Hilang BPKB AB 6417 AS a/n Andy Sulistyanto ST d/a Danunegaran MJ 3/1039 RT 067/018 MJ Yogyakarta	BPKB AB 6498 MQ an Westri Winarsih d/a Perum KCVRI No.82 Kencuran Rt 011/036 Sukoharjo Ngaglik Sim
Hilang BPKB No.L-108421091 a/n Ummi Muthmainnah d/a Keparakan Kidul MG I/1243 RT 57/13 Yogyakarta	Hilang BPKB No. 20105894 I AB 2290 BU a/n Gunarta S.Sos d/a Parakan Wetan Rt 02/21 Sendangsari Minggir Sleman
Hilang BPKB AB 2881 MQ a/n Ulinnuha d/a Salakan RT 003/RW 026 Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta	Hilang BPKB No. 20105894 I AB 2290 BU a/n Gunarta S.Sos d/a Parakan Wetan Rt 02/21 Sendangsari Minggir Sleman
Hilang BPKB 364222 I/AB 6221 DA a/n Putut Sarwono d/a Jl.Ngagem No.91 Kraton YKA	Hilang BPKB No. 20105894 I AB 2290 BU a/n Gunarta S.Sos d/a Parakan Wetan Rt 02/21 Sendangsari Minggir Sleman